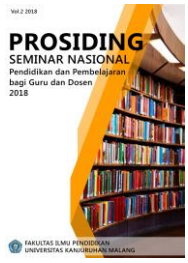

Prosiding Seminar Nasional

"Pengembangan Profesionalisme Dosen dan Guru Indonesia"

https://semnas.unikama.ac.id/fip/artikel.php

Vol 2, Tahun 2018 | Halaman 339-344

Peran Guru sebagai Diseminator Pendidikan Emansipatoris di Sekolah Dasar

Fauzi Abdillah[1], Nono Harsono Sunaria[2]

Program Studi PGSD, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru, Indonesia

abdillah@upi.edu

Informasiartikel

Kata kunci: Pendidikan Emansipatoris, PPKn, Guru Sekolah Dasar

ABSTRAK

Hilangnya watak emansipatoris pada praktik pendidikan di negeri ini membawanya jadi sekadar proses pelatihan dan pengajaran semata. Narasi pendidikan pun semakin menjauhi basis kemanusiaan, sehingga niat untuk mendapatkan gelar dan ijazah justru jadi kucing dalam karung seorang warga negara menempuh proses pendidikan. Dengan tujuan untuk mengupas dan mempromosikan guru sebagai role model Pendidikan Emansipatoris, artikel ini menganalisis prospek pedagogis dan instruksional Pendidikan Emansipatoris oleh Guru Sekolah Dasar. Analisis kurikulum dikhususkan pada PPKn sebagai mata pelajaran yang terintegrasi secara tematik. Kajian ini menghasilkan rekomendasi bahwa jiwa emansipatoris di sekolah dasar cukup prospektif, karena konten materi PPKn di SD sudah adequate dalam kerangka Pendidikan Nasional yang berkelanjutan. Selanjutnya, diperlukan kajian secara pragmatik pedagogis Pendidikan Emansipatoris untuk Guru di Sekolah Dasar.

Copyright © 2018 Fauzi Abdillah[1], Nono Harsono Sunaria[2]. All Right Reserved

Dalam konstruk kurikulum 2013 revisi 2016, terminologi Pendidikan Emansipatoris memang belum tersaji secara eksplisit. Konsekuensinya, gagasan emansipatoris melalui pendidikan tersebut belum banyak teridentifikasi, tergali, bahkan teraktualisasi di lapangan. Guru sebagai implementator di lapangan, memiliki peran penting untuk melaksanakan itu semua. Bertemali dengan hal tersebut, asumsi bahwa guru yang memiliki kesadaran emansipatoris dalam pendidikan cenderung dapat melaksanakan proses aksi-refleksi yang dinamakan *Praxis*. (Biesta, 2017) Seperti yang dipromosikan oleh Paulo Freire, yakni pembelajaran terkait gender yang emansipatoris, sehingga tiga kontribusi utamanya yang terdiri dari *to emancipation*, *to literacy*, dan *to dialogue* diwujudkan dalam proses pembelajaran. (Stromquist, 2014) Pertanyaannya, apakah guru sudah memiliki pemahaman dan kesadaran terkait gagasan Pendidikan Emansipatoris?

Pendidikan Emansipatoris dalam konteks studi berangkat dari paradigma anti-kolonial, yang mencoba menyisihkan aspek ketidakadilan, dominasi dan eksploitasi. Emansipatorisme ini perlu dirasakan dan dihadirkan oleh Sekolah, Guru, Siswa, Pemerintah dan masyarakat, jadi tidak ada keterpisahan epistemologi maupun partikularisme, sehingga bisa dimaknai sebagai kebersamaan upaya untuk menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, kemanusiaan dan universalisme.

Kurikulum yang menjadi acuan tentu perlu mempertajam basis kemanusiaannya dalam landasan filosofis maupun metodologi praktis. Kompetensi Guru, juga perlu diwarnai Emansipatoris, sehingga kemerdekaan manusia bisa terwujud secara bertahap, kolaboratif dan berkelanjutan. Sehingga, pembelajaran bisa berwujud sempurna sebagai *a work on being* dan

penemuan kemungkinan perjumpaan otentik antara *beings* di luar dominasi. (Lissovoy, 2015) Maka, tentu kita perlu membangun jejaring pedagogis dalam kerangka Pendidikan Emansipatoris yang holistik dan komprehensif, yang salah satunya yaitu kemampuan reflektif guru, sehingga tiap proses pendidikan akan dimaknai, bermakna dan berkembang. (Abdillah, 2017)

Sejauh ini, gagasan Pendidikan Emansipatoris sudah dikembangkan secara bervariasi dalam beberapa konteks, antara lain dari interaksi guru dan siswa yang komunikatif-dialogis (Rukiyati & Andriyani, 1999), Pendidikan sejarah (Farisi, 2003), studi ke-Islam-an (Nurhayati, 2009), dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Zuhriyah, 2012; Riyadi, 2015) Pengembangan tersebut memang belum merambah pada area PKn secara konseptual maupun praksis, terutama dalam konteks Sekolah Dasar.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang banyak dikenal sebagai Pendidikan Demokrasi, memiliki modus operasi dan karakteristik yang sudah spesifik dalam area Pendidikan. Istilah tersebut membawa atribut bahwa PKn memang menjadi wahana demokrasi dan Pendidikan demokrasi sekaligus. (Galston, 2004) , maka wajar jika PKn yang disebut Pendidikan untuk demokrasi bersifat multifacet yang komprehensif. (Cecchini, 2004) Dalam demokrasi, warga negara yang terorganisir biasa melakukan aktivitas advokasi (Brelàz, 2011), warga negara memiliki arenanya saat menjadi advokat bagi pihak yang memiliki status yang tidak beruntung secara sosial, politik, maupun ekonomi.

Dalam konteks sekolah dasar, para guru memiliki persepsi bahwa PKn di SD memiliki modus operasional terbaik dianggap sebagai media paling relevan untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap nilai, moral, kecakapan hidup bermasyarakat nantinya. (Abdillah F. , 2018) Walau memang, dalam studi ini belum spesifik, nilai dan moral seperti apa yang perlu dipahami sebagai etos dan kecakapan hidup bermasyarakat seperti apa yang dapat dipupuk di tingkat Sekolah Dasar.

Dengan demikian, kita perlu menentukan ke mana berlabuhnya guru di pulau Pendidikan Emansipatoris. Maka yang perlu dipahami sebelumnya apakah pijakan konten materi di Sekolah Dasar memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai dermaga berlabuhnya asumsi ini? Tentu secara khusus, artikel ini akan menelusuri prospek pengejewantahan kerangka pendidikan emansipatoris secara konseptual teoretis ditilik dari instrumen materi yang dapat dikembangkan oleh guru tingkat sekolah dasar.

METODE

Artikel ini dikonstruksikan melalui penelitian kualitatif dengan metode analisis konten. Ada pun dokumen yang dianalisis adalah Permendikbud Tahun 2016 No. 021 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya bagian Muatan Pendidikan Kewarganegaraan pada SD/MI. Standar Isi yang memuat ruang lingkup materi tersebut, dianalisis berdasar pada karakteristik Pendidikan Emansipatoris. Data akan disajikan secara kualitatif naratif dalam konteks pengembangan kompetensi guru di Sekolah Dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam studi ini, konten yang dianalisis adalah Permendikbud Tahun 2016 No. 021 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya bagian Muatan Pendidikan

Kewarganegaraan pada SD/MI. Melalui kategorisasi dan proses reduksi, maka tergambar di bawah ini delapan konten materi di tingkat Sekolah Dasar, yaitu:

1. Semiotika Lambang Negara: Garuda Pancasila
2. Nilai-nilai dan Moral Pancasila dalam Perbuatan
3. Menaati Hukum dan Peraturan
4. Kebersamaan dalam Keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika)
5. Gotong Royong
6. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Negara
7. Persatuan dan Kesatuan Bangsa
8. Cinta Tanah Air (Patriotisme)

Materi-materi tersebut merentang dari kelas satu sampai kelas enam. Jika dilihat dalam dokumen lain yang relevan, yaitu Permendikbud no. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Sebagai gambaran dan contoh, di bawah ini merupakan KI dan KD PKn untuk kelas IV

Table 1 *KI dan KD PKn kelas IV Sekolah Dasar*

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	**KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)**
1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya
KOMPETENSI DASAR	**KOMPETENSI DASAR**
1.1 Menerima makna hubungan bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara "Garuda Pancasila" sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.1 Bersikap berani mengakui kesalahan, meminta maaf, memberi maaf, dan santun sebagai perwujudan nilai dan moral Pancasila.
1.2 Menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama	2.2 Menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air
1.3 Mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika	2.3 Bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika
1.4 Mensyukuri berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.4 Menampilkan sikap kerja sama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	**KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)**
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
KOMPETENSI DASAR	**KOMPETENSI DASAR**
3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila	4.1 Menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam

	kehidupan sehari-hari
3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	4.2 Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
3.3 Menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari	4.3 Mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari
3.4 Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan	4.4 Menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan

Tabel di atas merupakan KI & KD Kurikulum 2013 revisi 2016. Secara keseluruhan, tiap komponen di tiap tingkat kelasnya memang berkembang dan berbeda dalam hal taksonomi dan keluasan serta kedalaman materi untuk PKn di tingkat Sekolah Dasar.

Dalam kerangka Pendidikan emansipatoris, kompetensi inti 2 (sosial) menjadi perhatian khusus, misalkan pada kompetensi dasar **2.3** dan **2.4** di Tabel 1 di atas, menyiratkan pendapat (Lissovoy, 2015) bahwa pembelajaran harus berfungsi sebagai proses *beings* dan lokasi perjumpaan *beings* di luar struktur dominasi. Memiliki sikap toleran dan kerja sama dalam kerangka serta konteks Bhinneka Tunggal Ika, bukan sekadar imperatif dari mereka yang mempunyai kuasa. Dari hal tersebut, aktivitas advokasi (Brelàz, 2011), sangat dimungkinkan untuk terlaksana. Hal itu bisa didukung juga oleh interaksi guru dan siswa yang komunikatif-dialogis (Rukiyati & Andriyani, 1999), sehingga gagasan Freire agar pendidikan menjadi media untuk mengemansipasi, membuat literat dan wahana dialog (Stromquist, 2014) bisa terlaksana, khususnya melalui pembahasan materi PKn secara reflektif.

Dalam perspektif profesional, dengan mengacu pada UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, seorang guru sebagai pendidikan wajib menguasai Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Profesional. Secara normatif, penjelasan tiap kompetensi tersebut tercantum pada Pasal 10 ayat (1), yaitu

> " Yang dimaksud dengan **kompetensi pedagogik** adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang dimaksud dengan **kompetensi kepribadian** adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Yang dimaksud dengan **kompetensi profesional** adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Yang dimaksud dengan **kompetensi sosial** adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar."

Penulis sengaja mencetak tebal isi pasal 10 tersebut untuk kebutuhan kajian dalam pembahasan ini. Dalam operasionalisasinya, Pendidikan Emansipatoris menurunkan karakteristik dan spiritnya pada empat kompetensi tersebut.

Dalam hal kompetensi pedagogik, guru selain mampu mengelola pembelajaran, juga perlu mempertimbangkan (Biesta, 2017) untuk terlibat dalam proses aksi-refleksi. Kemudian kompetensi kepribadian, teladan yang yang diturunkan dan ditunjukkan sebagai proses mengemansipasi, membuat literat dan menghadirkan suasana egaliter dengan dialog. (Stromquist, 2014) Kompetensi profesional, mengenai penguasaan materi pembelajaran secara luas dan dalam, kedalaman penguasaan terjadi karena refleksi guru (Abdillah, 2017) sehingga pembelajaran PKn dapat memfasilitasi pendidikan demokrasi (Galston, 2004) yang multifacet (Cecchini, 2004). Dan terakhir, kompetensi sosial, yaitu berkomunikasi secara efektif dalam kerangka pendidikan

emansipatoris bisa dimaknai sebagai aktivitas advokasi (Brelàz, 2011) sehingga tercipta kemungkinan perjumpaan otentik di luar dominasi. (Lissovoy, 2015).

Pertimbangan dan kajian dalam hal ini, berujung pada optimisme pada pendekatan kurikuler di sekolah dasar untuk memulai proyek "emansipatorisasi" di tingkat pendidikan dasar. Tersedianya fitur normatif, legal formal, teoretis-konseptual dan pedagogis-praktis dalam pendidikan dasar menjanjikan pengembangannya secara otentik untuk menyadarkan serta menyukseskan agenda emansipatoris melalui pendidikan.

SIMPULAN

Kajian prospektif pengembangan kompetensi guru melalui Kerangka Pendidikan Emansipatoris ini mengerucut pada optimisme. Hal tersebut berkaitan dengan tersedianya dukungan dari perangkat kurikulum, khususnya standar isi pembelajaran PPKn di SD/MI. Materi di tingkat Sekolah Dasar tersebut dapat menjadi media transmisi dan aktualisasi guru untuk mendiseminasikan wacana emansipatoris dalam pendidikan, melalui kompetensi guru, yaitu profesional, pribadi, sosial, dan pedagogik. Mengembangkan kompetensi guru sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran dari kerangka Pendidikan Emansipatoris. Maka, penelusuran lanjutan perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk mendapatkan format yang lebih kontekstual, filosofis, dan pragmatis untuk pengembangan kualitas guru dan kualitas pendidikan yang dimulai dari sekolah dasar.

DAFTAR RUJUKAN

Abdillah, F. (2017). Revitalisasi Kemampuan Refleksi Mahasiswa Calon Guru Melalui Penulisan Jurnal Perkuliahan PPKn. *EDUHUMANIORA: Jurnal Pendidikan Dasar*, 9(1), 8-15.

Abdillah, F. (2018). Mendidik Warga Negara Indonesia Di Sekolah Dasar: Perspektif Guru. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 8(2), 60-67.

Biesta, G. (2017). Don't be fooled by ignorant schoolmaster: On the role of the teacher in emancipatory Education. *Policy Futures in Education*, 15(1), 52-73.

Brelàz, G. &. (2011). Deliberative democracy and advocacy: lessons from a comparative perspective. *Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration*, 28(2), 202-216.

Cecchini, M. (2004). *Education for democratic citizenship in Europe : Concepts and challenges for action*. NECE, (pp. 1-11).

Farisi, M. I. (2003). *Pendidikan Sejarah sebagai Pendidikan Kebangsaan yang Emansipatoris dan Membebaskan.* In H. Sjamsuddin , & A. Suwirta , Historia Magistra Vitae: Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Hj. Rochiati Wiriaatmadja, MA. Bandung: Historia Press.

Galston, W. A. (2004). *Civic education and political participation*. PS: Political science and politics, 37(2), 263-266.

Lissovoy, N. D. (2015). *Education and emancipation in the neoliberal era : being, teaching, and power*. New York: Palgrave Macmillian.

Nurhayati, E. (2009). *Pendidikan Emansipatoris, Mengajak Masyarakat untuk Berbuat Bersama Berperan Bersama Berperan Setara dalam Studi Islam: Memanusiakan Manusia Perspektif Sosial Kritis Transformatif*. Cirebon: P3M STAIN Cirebon.

Riyadi, A. A. (2015). Model Pembelajaran Pendidikan Islam Emansipatoris. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 2(2), 26-33.

Rukiyati, & Andriyani, L. (1999). Pendidikan Emansipatoris dan Masyarakat Madani. *Cakrawala Pendidikan*, 3(4), 143-148.

Stromquist, N. P. (2014). freire, literacy and emancipatory gender learning. *Int Rev Educ*, 545-558.

Zuhriyah, I. A. (2012). Misi Emansipatoris Penyelenggaraan Pendidikan Islam. *Madrasah*, 4(2), 259-278.